

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu wilayah, dimana pembangunan suatu wilayah belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya Produk Domestic Bruto (PDB) tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro & Smith, 2011)

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015)

UNDP (*United Nations Development Programme*) membentuk indikator bernama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri menjadi salah satu indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan penduduk daerah yang berlaku secara internasional. IPM meliputi tiga bidang pembangunan yang dianggap mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik nya meliputi kesehatan berupa angka harapan hidup, pendidikan berupa



angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak berupa kemampuan daya beli (Fahmi, 2015).

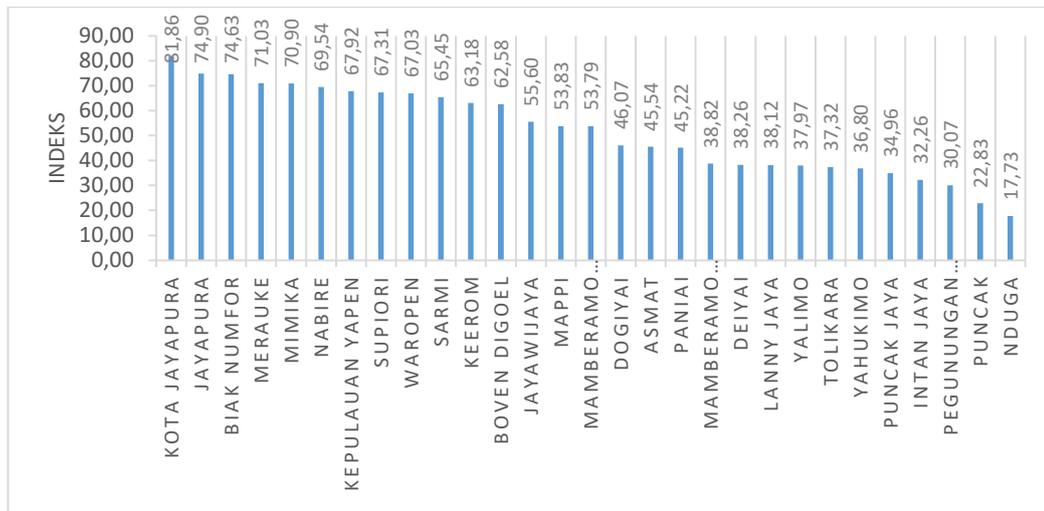
Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam pembangunan manusia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Papua memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan di wilayah ini. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, Keterbatasan infrastruktur serta ketimpangan sosial-ekonomi turut mempengaruhi akses masyarakat Papua terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Kualitas pendidikan adalah indikator penting dalam pembangunan manusia, karena pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan daya saing individu dalam masyarakat. Indikator kualitas pendidikan meliputi beberapa dimensi utama seperti tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf dan rasio guru terhadap murid. Kualitas pendidikan di Provinsi Papua masih tertinggal dengan berbagai masalah seperti keterbatasan infrastruktur sekolah, kekurangan tenaga pengajar, serta tingkat partisipasi sekolah yang rendah. Banyak anak di Papua tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah akibat faktor ekonomi dan geografi. Hal ini menyebabkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Papua jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang berdampak negatif terhadap kemampuan SDM Papua untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya berhubungan dengan peningkatan kesempatan ekonomi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi



eningkatan kualitas pendidikan tercermin dalam indikator seperti Angka Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan tingkat kelulusan.

Wilayah-wilayah dengan akses pendidikan yang lebih baik cenderung menunjukkan hasil yang lebih positif dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (UNDP, 2018). Data Indeks Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 1 Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Gambar di atas memperlihatkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas dan akses pendidikan di berbagai daerah. Kota Jayapura memiliki indeks pendidikan tertinggi yaitu 81,86 menandakan kualitas dan akses pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 74,90 Kabupaten Biak Numfor sebesar 74,63 dan Kabupaten Merauke sebesar 71,03 yang juga menunjukkan kondisi pendidikan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan daerah di Papua. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Nduga (17,73), Puncak (22,83), dan Pegunungan Bintang (30,07) menunjukkan indeks pendidikan yang sangat rendah yang mungkin mencerminkan tantangan besar dalam hal akses dan kualitas pendidikan seperti infrastruktur yang buruk atau kondisi

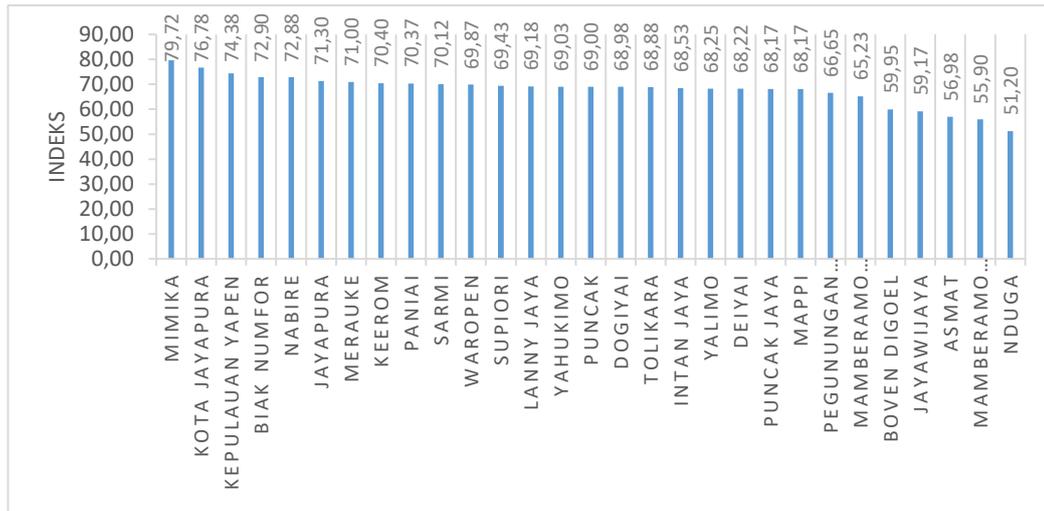
yang sulit dijangkau.



Kualitas kesehatan adalah salah satu indikator utama dari kesejahteraan masyarakat dan merupakan faktor krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kesehatan yang baik tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu tetapi juga berdampak pada produktivitas, stabilitas ekonomi, dan kemajuan sosial suatu negara. Kualitas kesehatan di Provinsi Papua juga mencerminkan ketertinggalan yang signifikan. Akses terhadap layanan kesehatan di wilayah pedalaman sangat terbatas, yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, prevalensi penyakit menular, dan masalah gizi buruk. Layanan kesehatan yang berkualitas memungkinkan individu untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan efektif, yang dapat mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan memperpanjang umur.

Namun kualitas kesehatan sering dipengaruhi oleh sejumlah faktor, Kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis terutama di daerah terpencil, semakin memperburuk situasi ini dan dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Meskipun beberapa daerah seperti Kota Jayapura memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik, ketimpangan ini masih menjadi masalah besar di kabupaten/kota lainnya. Selain itu faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan dan kemiskinan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk membayar perawatan medis yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan. Berikut data Indeks Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:





Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 2 Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan perbedaan signifikan dalam kualitas layanan kesehatan di Provinsi Papua. Kabupaten Mimika mencatat indeks kesehatan tertinggi dengan nilai 79,72 menandakan bahwa daerah ini memiliki fasilitas kesehatan dan akses yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Kota Jayapura mengikuti dengan indeks 76,78 menunjukkan kualitas kesehatan yang cukup baik. Di bawahnya, kepulauan Yapen (74,38), Biak Numfor (72,90), dan Nabire (72,88) menunjukkan sistem kesehatan yang relatif baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Sementara itu, daerah seperti Jayapura (71,30), Merauke (71,00), dan Keerom (70,40) menunjukkan tingkat kesehatan yang baik namun tidak setinggi daerah dengan indeks tertinggi.

Sedangkan Pegunungan Bintang (66,65), Mamberamo Tengah (65,23) dan Boven Digoel (59,95) menunjukkan tingkat kesehatan yang lebih rendah, mencerminkan kesulitan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sisi lain, daerah dengan indeks kesehatan paling rendah seperti Asmat (56,98), Mamberamo Raya (55,90), dan Nduga (51,20) menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa beberapa



wilayah memerlukan perhatian dan upaya lebih untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Salah satu peran pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyata peran pemerintah yaitu melalui kewenangan dalam hal pengelolaan fiskal. Diantara berbagai kebijakan fiskal tersebut ada kebijakan dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pengeluaran untuk sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran di bidang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah sehingga dapat meningkatkan angka harapan sekolah. Demikian pula, anggaran di bidang kesehatan akan mampu meningkatkan angka harapan hidup serta mampu menurunkan angka kematian.

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memperbaiki kualitas SDM di Provinsi Papua. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua. Namun, efektivitas dari pengeluaran ini masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor seperti distribusi anggaran yang tidak merata, inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta tantangan geografis dan sosial turut berperan



hambat efektivitas program-program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan fiskal agar pengeluaran di

sektor pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pembangunan manusia di Provinsi Papua.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 3 Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan selama periode 2014-2023. Terlihat bahwa pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan yang konsisten meskipun fluktuatif selama periode tersebut. Pada tahun 2014 pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan berada di angka Rp. 4,95 triliun dan Rp. 3,57 triliun kemudian terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai Rp. 6,81 triliun dan Rp. 4,78. Namun, baik pengeluaran pendidikan maupun pengeluaran kesehatan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh efisiensi anggaran dimana pemerintah dapat mengurangi anggaran belanja untuk sektor pendidikan akibat perubahan prioritas



akan fiskal. Selain itu, penyesuaian alokasi anggaran juga dapat mengurangi alokasi belanja pendidikan dan kesehatan dimana

terdapat fokus belanja pemerintah pada sektor lain misalnya infrastruktur atau pertahanan. Sementara itu, pada tahun 2021, pengeluaran pendidikan mengalami penurunan meskipun pengeluaran kesehatan meningkat hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2021, pemerintah cenderung meningkatkan anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi, seperti pembelian vaksin, fasilitas kesehatan, dan bantuan medis, sementara aktivitas pendidikan yang beralih ke daring mengurangi kebutuhan operasional pendidikan. Pada tahun 2023, terlihat peningkatan signifikan pada kedua sektor di mana pengeluaran pendidikan mencapai puncak tertinggi sementara pengeluaran kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kemungkinan kebijakan baru untuk memperbaiki kualitas serta akses pendidikan. Di sisi lain, pengeluaran kesehatan mencerminkan stabilisasi anggaran setelah fase kritis pandemi.

Gambar 1.3 menunjukkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan selama periode 2014-2023. Indeks pendidikan secara perlahan meningkat dari 46,81% pada 2014 menjadi 54,81% pada 2023, meskipun peningkatannya relatif lambat dibandingkan pertumbuhan belanja pendidikan. Sementara itu, indeks kesehatan lebih stabil di kisaran 74-77%, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 (86,42%) hal ini berkaitan dengan pemulihan pasca pandemi setelah puncak pandemic Covid-19 banyak pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk layanan kesehatan, seperti vaksinasi massal, penyediaan fasilitas medis, dan program pemulihan kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan selama pandemi dan program kesehatan prioritas yang dimana mungkin pelaksanaan program kesehatan nasional yang berhasil seperti layanan primer, pengurangan angka kematian ibu dan anak, atau rasio penyakit menular, sebelum kembali turun menjadi 77,40% pada tahun



2023. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah berkontribusi pada peningkatan indeks pendidikan dan kesehatan, meskipun efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana alokasi anggaran pemerintah di kedua sektor ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan, sehingga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dapat lebih efektif, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode 2014-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2014-2023?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2014-2023?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kualitas pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan pentingnya pengalokasian dana bidang pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta dijadikan sebagai bahan kajian atau pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Papua.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Modal Manusia (Human Capital)

Pada tahun 1961, teori modal manusia (*human capital*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz. Dalam teorinya Schultz menyatakan bahwa manusia merupakan suatu modal sebagaimana bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Selain itu Schultz juga menekankan pada pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Dimana investasi dalam modal sosial juga akan mendatangkan imbalan (penghasilan) dimasa mendatang sama seperti investasi dalam modal fisik (Schultz, 1961).

Becker (1993) selanjutnya melakukan pengembangan terhadap konsep pemikiran Schultz yang mendefinisikan *human capital* sebagai berikut manusia bukan sekedar sumber daya namun juga dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting, dimana dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan dan juga dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dikatakan sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan nilai-nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka. Menurut Becker, modal manusia fokus pada cadangan keterampilan dan pengetahuan reproduksi manusia melalui

pendidikan dan kesehatan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan orang menggambarkan semakin tinggi juga modal yang diharapkan. Oleh



karena itu, investasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, di mana semua masyarakat mendapatkan hak yang sama, karena pada implementasinya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan karena pendapatan yang mereka peroleh difokuskan untuk kebutuhan pangan (Becker, 1993).

Menurut Todaro (2000), melalui bidang pendidikan dan kesehatan bisa dilakukan investasi modal manusia. Pada kedua bidang ini memiliki peran yang sangat penting, pendidikan dapat menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi yang modern dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kesehatan merupakan hal yang penting dalam peningkatan produktivitas. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input dari fungsi produksi agregat. Pengembangan modal manusia memiliki beberapa faktor penting, diantaranya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi suatu nilai tambah bagi seorang pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara sederhana semakin tinggi pendidikannya semakin kemungkinan semakin tinggi juga penghasilan yang akan didapatkan. Investasi modal manusia dalam bidang pendidikan merupakan faktor penting, karena pendidikan dapat menciptakan modal manusia yang berkualitas dan juga dapat memberikan multiplier effect dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

Di samping pendidikan dan latihan, kesehatan juga merupakan faktor penunjang pengembangan modal manusia. Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas dan kapasitas dalam meningkatkan pendidikan. Tenaga kerja

memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik akan lebih produktif dibandingkan yang tingkat kesehatannya rendah, semakin tinggi produktivitas



yang dimiliki juga akan mendapatkan penghasilan yang semakin tinggi. Dapat disimpulkan kesehatan merupakan input penting bagi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

2.1.2 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan. Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan gabungan dua indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang akan menjadi salah satu komponen pembentuk IPM (BPS, 2021).

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah tidak akan turun. Sedangkan cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Usia 25 tahun keatas dipakai batasan berdasarkan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 keatas tidak bersekolah lagi. Walaupun

gian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan.



Penduduk usia 25 tahun keatas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan data IPM metode terbaru yang dikeluarkan oleh BPS adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Untuk menghitung indeks pendidikan menurut BPS digunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Keterangan:



$I_{Pendidikan}$ = Indeks Komponen Pendidikan

I_{HLS} = Indeks Komponen Rata-Rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah Terendah (0 tahun)

RLS_{maks} = Rata-rata Lama Sekolah Tertinggi (15 tahun)

I HLS = Indeks Komponen Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah Terendah (0 tahun)

HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah Tertinggi (18 tahun)

2.1.3 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah. Salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks kesehatan. Umur Harapan Hidup saat lahir adalah sebuah indikator yang mengukur rata-rata tahun yang diperkirakan seseorang dapat hidup sejak lahir. Ini adalah salah satu komponen utama yang digunakan dalam menghitung IPM dan juga merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan perkembangan sosial suatu negara atau wilayah. Angka Harapan Hidup saat lahir memberikan perkiraan tentang seberapa lama seseorang dapat diharapkan untuk hidup berdasarkan tingkat harapan hidup rata-rata dalam suatu populasi. Setelah mendapatkan angka harapan hidup selanjutnya dihitung indeks kesehatan dengan menggunakan dua batasan, yakni batasan maksimalnya sebesar 85 tahun dan batasan minimalnya sebesar 20 tahun (Badan Pusat Statistik, 2022).

Komponen Indeks Kesehatan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$



Keterangan:

I Kesehatan = Indeks Komponen Kesehatan

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH_{min} = Angka Harapan Hidup Terendah (20 tahun)

AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup Tertinggi (80 tahun)

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah (APBD). Menurut Boediono (2012) pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai, dan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran *transfer payment*. Tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pengeluaran daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan masyarakat. Sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah ah, pengeluaran daerah harus diarahkan untuk melindungi dan ngkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara



meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan serta menyediakan fasilitas kesehatan, sosial dan umum yang memadai. Selain itu, pengembangan jaminan sosial juga menjadi perhatian dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah hal mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi (Todaro, 2006). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi negara berkembang, terutama dalam kemampuan menyerap teknologi modern dan membangun kapasitas untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut (Schweke, 2004) pendidikan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat secara keseluruhan.

Investasi dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sehingga pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan sistem pendidikan yang memadai. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan menjadi bukti nyata dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Dana pembangunan di sektor pendidikan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendidikan serta memberi layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat



nesia.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari APBN merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Wahid, 2012). Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa dana pendidikan di luar gaji tenaga pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan setidaknya 20% dari APBN dan APBD. Besarnya alokasi anggaran ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap perbaikan komponen utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Tanpa kondisi kesehatan masyarakat yang memadai, sebuah negara tidak akan mampu mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran sektor kesehatan dalam mendukung pembangunan nasional, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam aspek pencegahan dan promosi kesehatan, tanpa mengabaikan layanan pengobatan dan pemulihan. Selain itu, pendidikan tenaga kesehatan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dampaknya luas terhadap upaya peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan (Notoatmodjo, 2008).

Sumber pembiayaan untuk kesehatan terbagi menjadi dua kategori yaitu sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta. Sumber pembiayaan pemerintah meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta bantuan dari luar negeri. Sementara itu, sumber dari swasta meliputi perusahaan swasta dan BUMN yang membiayai karyawan mereka, badan elenggara asuransi kesehatan, serta lembaga non-pemerintah yang



berfokus pada kegiatan kesehatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan (Wasisto & Ascobat, 1986).

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan dana yang berkelanjutan, mencukupi, dialokasikan secara adil, dan dimanfaatkan dengan efektif, guna menjamin pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, pasal 171 ayat 1 menetapkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah harus mencapai 5 persen dari APBN, di luar gaji. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD juga di luar gaji.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kualitas Pendidikan

Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan indeks pendidikan suatu daerah, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan IPM di daerah tersebut. Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Pemerintah daerah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam bentuk modal manusia (*human capital*). Modal manusia

ipakan investasi produktif terhadap orang-orang meliputi pengetahuan, ampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro & Smith, 2011).



Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa (Winarti, 2014).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mangkoesobroto (2016) menyatakan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soempena (2021) menunjukkan belanja pendidikan mempengaruhi peningkatan indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Kualitas Kesehatan

Pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor kesehatan adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Pake, 2018).



Todaro & Smith (2003), bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Astri (2013) menyatakan bahwa melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan menurut turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, maupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Melalui alokasi dana ini, pemerintah dapat membangun fasilitas kesehatan, menyediakan akses yang lebih luas ke layanan medis, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil. Dengan alokasi anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik.

2.3 Tinjauan Empiris

Mahendra, dkk (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pendidikan di provinsi Jawa Timur, memformulasikan strategi untuk meningkatkan Indeks



pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda data panel, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi indeks pendidikan di Jawa Timur secara positif yaitu variabel alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah SMP, angka partisipasi sekolah SMA, dan rasio murid guru tingkat SD.

Hasil penelitian Margaretha dan Simanjuntak (2020) membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2012-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA.

Reza, dkk (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi realisasi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap tingkat kesejahteraan kesehatan (AHH) di Kalimantan Barat tahun 2009-2012. Metode analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel alokasi pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap AHH dan variabel tenaga medis berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan kesehatan (AHH).

Putra, dkk (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dalam peningkatan RLS di Kabupaten Bogor. Metode analisis yang digunakan yaitu SWOT untuk merumuskan alternative strategi



dan QSPM untuk menentukan strategi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran bidang pendidikan yang produktif menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor.

Suhendi dan Astuti (2023) meneliti terkait Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran pemerintah Bidang kesehatan dan Pendidikan Terhadap IPM di Provinsi Papua periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan PDRB, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua tahun 2017-2022.

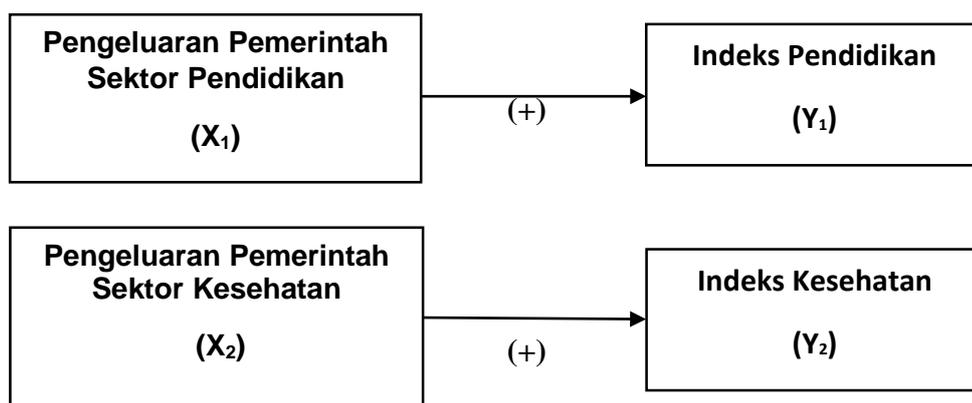
2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2014-2023. Variabel bebas terdiri dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan sebagai variabel terikatnya. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap Kualitas pendidikan. Investasi di sektor ini, seperti yang dijelaskan oleh Todaro (2000) adalah bentuk investasi dalam modal manusia. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan tingkat melek huruf, rata-rata tahun sekolah dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pendidikan tidak a berfungsi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tetapi



juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup individu. Ketika masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, mereka cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka, serta memperkuat IPM secara keseluruhan.

Selain pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan juga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Kesehatan yang baik adalah salah satu pilar utama dari kualitas hidup yang tinggi. Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, serta program kesehatan seperti imunisasi dan pencegahan penyakit sangat berpengaruh dalam meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Ketika layanan kesehatan lebih mudah diakses dan berkualitas, masyarakat menjadi lebih sehat, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Hal ini tentu saja berkontribusi pada peningkatan IPM, yang salah satu komponennya adalah umur panjang dan sehat. Dari pemaparan tersebut, maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada gambar 2.1 di atas maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
2. Diduga pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.





Optimized using
trial version
www.balesio.com